

ATJÈH MEURDÈHKA

Kanto Atjèh Meurdèhka Sweden Stockholm

Tujuan yang tertinggi dari Angkatan Aceh Sumatera Merdeka ialah keselamatan bangsa Aceh dan Sumatera, dunia dan akhirat, sebagai satu bangsa merdeka dan berdaulat dibawah Daulat Allah dan sebagai satu jama'ah dari pada satu Ummah: ini bermakna jaminan keselamatan nilai-nilai agama, politik, masjarakat, budaja dan ekonomi mereka, yang kesemuanya kini sedang dihancurkan oleh penjajahan Indonesia/Jawa; keselamatan tanah pusaka mereka yang kini sedang dirampas dan dibagi-bagikan kepada bangsa penjajah Jawa yang didatangkan beramai-ramai dengan memakai topeng sebagai "transmigrants"; keselamatan ekonomi dan kekayaan alam mereka yang kini sedang dirampok oleh penjajah Jawa dengan dalang-dalang mereka kaum imperialis Barat atas nama "pembangunan". (Dr. Tengku Hasan di Tiro, Indonesia as a Model Neo-Colony, London, 1984).



Tengku Hasan di Tiro

WAWANCARA EKSKLUSIF JUBIR GAM

Tengku Sulaiman Abdul Razak di Tiro



**WAWANCARA INI TI-
DAK DI PUBLIKASI OLEH
AWAK MEDIA**

ISU GAM MASIH SENSITIF

Oleh pemerintah Belanda sudah diharap-harapkan bahwa dengan syahidnya Wali Negara Aceh, Tengku Tjihk di Tiro Mohammad Saman, pada tanggal 25 January, 1891, perlawanan bangsa Aceh akan berakhir. Tetapi ternyata hal itu tidak terjadi. Perlawanan terhadap Belanda berjalan terus. Itulah sebabnya maka Hurgronje telah dikirim ke Aceh. Akhirnya Hurgronje gagal juga di Aceh, tidak berhasil mencapai maksud dan tujuannya sebab Ummat Islam Aceh tidak bersedia bekerja sama dengan dia. Tetapi walaupun kegagalannya di Aceh, Hurgronje juga muncul sebagai pembuat "Politik Islam" Kerajaan Belanda di "Indonesia". Usul-usulnya diterima dan menjadi politik rasmi dari Kerajaan Belanda sampai saat yang terakhir, waktu Belanda menyerahkan "kedaulatan"-nya kepada boneka-boneka Jawa-nya pada 27 Desember, 1949



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuah, pertanyaan jurnalis secara profesional kepada aktivis GAM di Europa.

Pertanyaan kepada political asylum dari aktivis GAM di europa

Apakah pihak GAM di Eropa masih memperjuangkan pemisahan kekuasaan dari negara RI ?

Dalam beberapa tahun ini, kami sudah membentuk berdirinya organisasi Majelis Gerakan Aceh Merdeka yang berkantor pusat di Stockholm Swedia. Secara bahasa hukumnya Aceh melalui wadah hukum ini masih tetap memperjuangkan agar pendudukan illegal negara penjajah Indonesia segera meninggalkan Aceh tanpa syarat agar Aceh sebagai sebuah entiti politik sambungan (Successor State) yang sah secara De Facto dan De Jure dapat menata, mengatur dan mengurus sendiri tata pemerintahan yang berdaulat tanpa campur tangan kuasa asing dari pulau Jawa indonesia.

Kedaulatan negara Aceh secara hukum nasional dan internasional tidak dapat dipertikaikan lagi dan sangat terang benderang berdasarkan bukti² sejarah dan pulau jawa sendiri tidak mempunyai sejarah politik dan diplomasi segemilang

dan sebesar negara Aceh di waktu itu. Hubungan diplomatik Aceh dengan negara² bertamadun dunia tersimpan rapi dalam lipatan sejarah asia timur dan dunia keseluruhannya. Ahli² sosiologi terbilang dunia ikut mengakui atas kemegahan dan kehebatan negara Aceh di abad ke 15, 16, 17 dan 18. Ultimatum perang Belanda ke atas negara Aceh juga sebagai suatu bukti nyata atas keabsahan sebuah kemerdekaan dan kedaulatan negara Aceh tercinta ini.

Pencaplokkan dan aneksasi indonesia ke atas kedaulatan negara Aceh dengan kerjasama penjajah Belanda pada tahun 1945 sangat bertentangan dengan hukum dan piagam internasional. Kami Bangsa Aceh tidak dapat menerima segala bentuk penjajahan dan imperialisme di bumi Aceh berdaulat ini samaada Perang kolonial Belanda di Aceh selama 40 tahun dan begitu jugalah kami tidak menerima pendudukan dan penjajahan indonesia ke atas tanah air berdaulat kami, Aceh mulia.

Sudah ada MoU Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh (UUPA), kenapa tidak dioptimalkan saja?

Sebahagian pimpinan, kombatan, aktivis dan simpatisan sudah memberikan jeda yang secukupnya untuk melihat wajah Aceh baru melalui pengimplementasian Inpres, UUPA serta qanun sepenuhnya tanpa adanya tebang pilih. Kita mengharapkan agar sistim perpolitikan Aceh yang bermartabat, yang menjunjung tinggi nilai autonomi sebenar, berdaulat serta berkeadilan tanpa standar ganda intervensi parnas² dalam pileg DPRA/DPRK; Pilgub dan Pilbup/Walkot, tata kelola pemerintahan sendiri Aceh dapat berjalan sebagaimana mestinya, perekon-

mian Aceh sudah bisa bernafas segar dan kencang kembali dengan kekayaan signifikan di sektor sumber daya alam termasuk petroleum, gas dan sumber daya mineral, sektor pertanian, sektor kelautan, sektor perlancongan serta sektor kemaritiman, kekuasaan penuh dalam pengoperasian pelabuhan laut dan udara serta kebebasan perdagangan domestik dan internasional, kedaulatan pendidikan Aceh sudah bisa menata falsafah pendidikannya sendiri, pemerksasaan seni adat dan budaya serta diberikan pengakuan otoritas/wewenang hukum semaksimalnya kepada kelembagaan adat masyarakat Aceh.

Namun semua itu tidak terbangun sepenuhnya dikernakan Jakarta hanya melepas batuk di tangga dalam memberikan daya momentum serta dorongan agar semua yg diatas terrealisasi. Malah lebih ironis Jakarta secara diam² melakukan aksi kontra intelligen agar hal² diatas menjadi tumpul, separuh masak dan tidak terwujud. Di peringkat Pusat Jakarta tidak bersungguh² melakukan reformasi hukum, reformasi struktural dan reformasi kehakiman untuk memberi jalan mulus kepada UUPA dan Qanun di Aceh. Segala ketimpangan dan pengkhianatan Jakarta ini terus berjalan sehingga ke hari di mana hanya sekelompok kecil saja pimpinan atasan yang ditidur lenakan menjadi proxy pemerintah pusat untuk terus menindas dan membohongi serta menabur janji² palsu kepada bawahan mereka dan masyarakat publik. Kelembagaan dan Badan² yang diijinkan seperti Lembaga Wali Nanggroe, BRA, BPMA dan lain sebagainya dipastikan tidak mempunyai otoritas/wewenang strategis apa pun tetapi hanya sebagai sebuah usaha tidak² bersungguh Jakarta di luaran per-

mukaan sahaja dan akan terus mengurus anggaran Aceh yang sejatin-ya milik rakyat.

Maka oleh yang demikian sesudah lebih 15 tahun jeda maka kami memutuskan untuk menyatakan bahwa kami dengan tegas menolak Persefahaman MoU Helsinki dan menyatakan sudah terbatal demi hukum di bumi Aceh. Kami juga menyatakan seluruh ex pimpinan eksekutif dan militer GAM yang menjadi proxy jakarta tidak lagi mempunyai legalitas hukum dan adat di dalam barisan perjuangan Angkatan Aceh Merdeka yg kami nyatakan sudah bersambung kembali.

Apakah tidak ada kekhawatiran gerakan politik pemisahan dari NKRI yang Anda lakukan di eropa, akan berdampak tidak baik kepada keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh, yang sedang menikmati perdamaian?

Ada sebuah frasa filosofis berbunyi “Bangsa besar yang mulia dan beradab selalu tahu untuk mati mulia di waktu mereka tidak boleh lagi hidup dengan mulia. Sebuah kematian yang dipilih dengan jiwa yang bebas dan merdeka di waktu yang paling tepat dan benar”.

Harus diingat Bangsa Aceh mulia adalah sebuah bangsa syuhada yang selalu cintakan negara dan agamanya. 35% dari penduduk Aceh yang memberi sumbangsih nyawa mereka untuk syahid di dalam apa yang disebut “Perang 100 Tahun di Abad Ini” oleh Harper’s Magazine didalam perang melawan kafir penjajah kolonial Belanda. Di dalam kultur budaya Bangsa Aceh itulah metode turun temurun untuk mensucikan

darah keturunan sebuah Bangsa yang mulia dan beradab ini dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Seluruh Bangsa Aceh wajib melawan penjajahan Indonesia. Bangsa Aceh tidak boleh menerima hidup dibawah penjajahan dan kezaliman. Itulah masa kita mati yang merdeka atau syahid. Akhirnya merdeka itu akan sampai apabila mau memilih mati merdeka. Apabila satu-satu bangsa tiada lagi keberanian memilih mati merdeka maka pada waktu lah merdeka akan sirna dari kehidupan.

Apakah yang Anda lakukan sehari-hari di europa untuk menghidupi diri dan keluarga anda?

Kita sudah hidup seperti masyarakat dunia yang merdeka tapi kita tidak pernah berhenti berkerja untuk memperjuangkan Kemerdeka Aceh

Dana otonomi khusus (otsus) sudah digelontorkan setelah MoU Helsynki dan penerapan UUPA. Setiap tahunnya meningkat anggaran otsus. Apakah itu tidak bisa mensejahterakan rakyat Aceh yang sudah lama terpuruk dan tertinggal secara ekonomi dan kesejahteraan dari provinsi lain di Indonesia ?

Secara Realitinya, sepengetahuan kami dana otsus itu sama sekali tiada kaitan dengan MoU Helsinki atau UUPA. Ianya sudah pun digelontorkan sejak era Megawati untuk menopang program NAD waktu itu. Lebih ironi lagi dana tersebut cair dengan persyaratan sangat ketat termasuklah porsi persentase untuk sektor² nya sudah diputuskan di Jakarta. Dana tersebut sangat sulit menyentuh golongan masyarakat

bawah secara holistik dan merata.

Apa harapan Anda kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di tahun-tahun terakhir masa pemerintahannya ?

Sejak mulai deklarasi Pernyataan Aceh Merdeka kembali di Pergunungan Halimon pada 04 Disember 1976 oleh Paduka Njang Mulia Wali Neugara Tengku Tjhik di Tiro Hasan Muhammad kami selaku generasi penerus waktu tu sudah mulai diasuh, di didik dan tumbuh besar dengan doktrin dan ideologi perjuangan kemerdekaan yang dibawa oleh Wali Neugara ke-VIII Tengku Tjhik di Tiro Hasan Muhammad untuk selalu mengenal jatidiri kami, berjiwa merdeka, berfikir merdeka dan berbuat serta bertindak selaku orang² yg bebas dan merdeka walau dimana jua kami berada.

Kami tidak pernah mengharapkan apapun dari sebuah bangsa penjajah indonesia atas tanah pusaka nenek moyang kami yang sudah dijarah, dirampok dan dibagi²kan selama 78 tahun belakangan ini dalam sebuah istilah negara Kesatuan/sentralisasi.

Tapi sebaliknya kami mengharapkan dari bangsa² dan negara² yang beradab dan bertamaddun serta organisasi²/NGO hak asasi manusia sedunia untuk selalu bekerjasama dengan kami di Majelis-GAM agar dapat menyalurkan bantuan² legal/hukum, bantuan perlindungan dari ancaman dan penangkapan, bantuan tribunal pengungkapan fakta, bantuan kepada ibu dan anak² dan lain² sebagainya.

Kami juga ingin tegaskan disini agar pihak Indonesia jangan pernah menggunakan apa pun bentuk kekuatan dibawah kendaliannya

untuk melakukan pengancaman, penangkapan tanpa diadili, penghilangan serta penyiksaan ke atas setiap warga bangsa Aceh yang menyuarakan kemahuan dan aspirasi politik mereka masing² berlandaskan hak kebebasan memberi pendapat dan hak² asasi manusia secara umumnya.

Apakah ada ekspektasi kepada pemerintahan RI yang akan dipilih melalui pemilu secara langsung tahun 2024 ?

Kami di Majlis Gerakan Aceh Merdeka Pusat selalu terus berusaha seoptimal mungkin menciptakan momentum desakan serta tekanan diplomatik dan politik agar negara² atau perkumpulan negara² tertentu di belahan dunia ini berkemampuan untuk menggiring pemerintahan Indonesia untuk bersedia membuka pintu dialog dan rundingan yang adil dan seksama untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas yang hakiki di gugusan kepulauan dunia melayu tanpa mengutamakan kepentingan sendiri tetapi satu keutamaan menyeluruh agar hak sebuah entiti politik Aceh secara De Jure dan De Facto bisa dikembalikan tanpa syarat apa pun.

Ini diharapkan agar dapat membangun satu kekuatan geo politik, ekonomi dan ketenteraan serta kemakmuran serantau yang disegani dunia di rantau gugusan kepulauan melayu dan ASEAN umumnya.

Aceh dan Indonesia sebagai dua buah negara tetangga yang merdeka dan berdaulat akan terus menjalin hubungan akrab dan bersaudara yang erat untuk saling mengeksploitasi kekayaan dan kelebihan yang dianugerahi Tuhan untuk kita dan generasi penerus kita di masa depan

nikmati sebagai satu kekuatan dan kestabilan politik dan ekonomi yang saling menguntungkan dirantau ini.

Beberapa hari lagi sudah memasuki 4 Desember, apakah ada pesan khusus kepada masyarakat Aceh dan eks kombatan GAM yang sudah berintegrasi dalam masyarakat di Aceh ?

Bangsa Aceh yang ada di luar Negara Aceh, Semua ikut memperingati hari bersejarah Redeclaration (Pernyataan kembali) Aceh Merdeka ini. Satu hal yang sudah terkenal untuk generasi ke depan anak bangsa Aceh ini, yang ada di Amerika, Canada, Europa, Australia, Malaysia dan di tempat lainnya. Semua ikut memperingati hari yang bersejarah ini. Anak-anak muda yang ada di luar dan di dalam Negara Aceh memperingati hari keramat ini dengan sangat bersahaja.

Sehingga nampak kita lihat bagaimana bendera pusaka Aceh ini berkibar dengan gagah di puncak tiang bendera yang di hembuskan anging. ini merupakan satu hal yang bisa kita lihat ke depan yang bahwa Negara kita akan bertambah dekat dengan Merdeka. cuma ada beberapa orang yang gelap mata, atau yang sudah membutakan mata dirinya sehingga tidak dapat melihat semangat Bangsa Aceh yang sudah sangat tinggi ini.

Apakah ada pesan khusus kepada masyarakat Aceh dan eks kombatan GAM yang sudah berintegrasi dalam masyarakat di Aceh ?

Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, kami di M-GAM Pusat ingin menyatakan dengan tegas kepada seluruh bangsa Aceh bah-

wa walau dalam keadaan apa sekali pun perjuangan menuntut hak menentukan nasib diri sendiri serta dekolonisasi yg masih tertunda harus disambung dan dilanjutkan sebagaimana yang termaktub di dalam amanah, wasiat bai'at.

MoU Helsinki sesuai dengan keputusan bersama di MEUDJEULIH GAM PUSAT sudah kita tolak dan dianggap terbatal untuk Aceh dan seluruh bangsa Aceh. Ini berarti bahwa MEUDJEULIH GAM PUSAT akan meneruskan perlawanan dan penentangan atas penjajahan Indonesia sama ada dari segi propaganda, penerangan, media, politik, ekonomi, diplomasi serta kekuatan apa saja yang bermartabat.

Kepada eks pimpinan elit GAM sipil mau pun militer pro Jakarta yang sudah masuk jauh ke dalam sistim ketatanegaraan mereka sudah kehilangan hak dan obligasi mereka selaku pimpinan baris depan di dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Aceh

Jawaban ini, dijawab oleh Jubir Meudjeulih GAM

Tengku Sulaiman Abdul Razak di Tiro

Kanto Atjèh Meurdèhka
Sweden Stockholm
Biro Atjèh Meurdèhka
Web. : <https://freeacheh.org>
E-mail : wareh@freeacheh.org
Email:jurubicara@freeacheh.org